

**PERANAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TERKAIT PERIZINAN DAN  
TATA KELOLA PENGGUNAAN GENSET DI PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Muhammad Farras Alfitra<sup>1</sup>, Mailinda Eka Yuniza<sup>2</sup>

**INTISARI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terkait perizinan dan tata kelola penggunaan genset di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atas kebijakan tata kelola pemerintah daerah dalam pengawasan terkait perizinan dan tata kelola penggunaan genset di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu, normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif yang disusun secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran utama terkait Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang terdiri dari empat pilar yaitu Keselamatan Kerja, Keselamatan Umum, Keselamatan Lingkungan, Keselamatan Instalasi yang terwujud dalam bentuk rekomendasi di bidang perizinan sektor ketenagalistrikan khususnya genset. Tindakan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta berupa verifikasi lapangan terkait dokumen administrasi dan juga teknis. Namun dalam pelaksanaan perizinan sektor ketenagalistrikan khususnya genset mulai dari proses permohonan hingga pengawasan perizinan masih saja ditemui hambatan-hambatan terkait kurangnya sosialisasi tentang perizinan genset, serta kuantitas SDM sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada banyak aspek.

**Kata Kunci:** Genset, Sertifikat Laik Operasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## THE ROLE OF SUPERVISION OF THE PUBLIC WORK DEPARTMENT OF HOUSING AND MINERAL ENERGY RELATED TO LICENSING AND GENSET USE GOVERNANCE IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION

Muhammad Farras Alfitra<sup>3</sup>, Mailinda Eka Yuniza<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the role of the Public Works Department for Housing and Energy and Mineral Resources related to licensing and governance of generator use in the Special Region of Yogyakarta Province, as well as the obstacles faced by the Public Works Office for Housing and Mineral Resources Energy on local government governance policies in supervision related to licensing and governance of generator use in the Province of Yogyakarta Special Region.

The research method used in writing this law is empirical normative with descriptive nature. This research begins with literature research to obtain secondary data followed by field research to obtain primary data. The data obtained from the literature and field research were analyzed qualitatively. The analysis in this study was carried out using qualitative data analysis which was arranged descriptively to achieve the research objectives.

Based on the results of the author's research, the Department of Public Works, Housing and Energy, Mineral Resources of the Special Region of Yogyakarta has the main role of Electricity Safety (K2) which consists of four pillars, namely Work Safety, Public Safety, Environmental Safety, Installation Safety which is manifested in the form of recommendations in the licensing sector of the electricity sector, especially the generator. The recommended action taken by the Public Works Office for Housing and Energy and Mineral Resources of the Special Region of Yogyakarta is in the form of field verification regarding administrative and technical documents. However, in the implementation of licensing in the electricity sector, especially generator set procedures, starting from the application process to licensing supervision, there are still obstacles related to the lack of socialization regarding generator licensing, as well as the quantity of human resources so that improvements are still needed.

**Keywords:** Genset, Operation Eligibility Certificate, Department of Public Works, Housing and Energy, Mineral Resources, Yogyakarta Special Region.

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>4</sup> Dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.